

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA GORONTALO MENURUT PENGELUARAN

2016-2020



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KOTA GORONTALO MENURUT PENGELUARAN

2016-2020

<https://gorontalokota.bps.go.id>



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KOTA GORONTALO
2016-2020**

ISSN : 2598-6880
Nomor Publikasi : 75710.2103
Katalog BPS : 9302020.7571

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xiv + 66 halaman

Naskah:
BPS Kota Gorontalo

Gambar Kulit:
BPS Kota Gorontalo

Diterbitkan Oleh:
©BPS Kota Gorontalo

Pencetak:
CV Rifaldi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
MENURUT PENGELUARAN
KOTA GORONTALO
2016-2020**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Ir. Rasjid Masjhur

Editor : Ade Iman Helingo, SST

Penulis : Ade Iman Helingo, SST

Pengolah data : Ade Iman Helingo, SST
Rofiarani Mountana, SST

Desain Kover dan Layout : Rofiarani Mountana, SST

<https://gorontalokota.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*Industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*Expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut Pendapatan/*Income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), dan Ekspor Neto (ekspor dikurangi dengan impor). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada para pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Gorontalo, April 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kota Gorontalo



Ir. Rasjid Masjhur

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	3
1.2 Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	6
Bab II Metode Estimasi dan Sumber Data.....	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	20
2.5 Perubahan Inventori.....	23
2.6 Ekspor Impor.....	26
Bab III Tinjauan Perekonomian Kota Gorontalo Berdasarkan PDRB Pengeluaran Kota Gorontalo Tahun 2016-2020.....	27
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Boalemo Menurut Pengeluaran.....	29
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	34
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	38
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	39
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto.....	41
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	42
3.7 Perkembangan Net Ekspor	43
Bab IV Perkembangan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo Tahun 2016-2020.....	45
4.1 PDRB (Nominal).....	47
4.2 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	48
4.3 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	50

Bab V Penutup.....	53
Daftar Pustaka.....	57
Lampiran.....	59

<https://gorontalokota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	30
Tabel 3. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Kota Gorontalo Menurut Pengeluaran, Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 6. Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	34
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	35
Tabel 8. Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 9. Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 10. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 12. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	41
Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	42
Tabel 15. Net Ekspor Kota Gorontalo, 2016-2020.....	44
Tabel 16. PDRB dan PDRB per Kapita Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020	47
Tabel 17. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Gorontalo, 2016-2020.....	49
Tabel 18. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Gorontalo 2016-2020..	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Gorontalo, 2016-2020.....	31
Gambar 2. Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, dan Penduduk Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	48
Gambar 3. Perkembangan Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	49
Gambar 4. Perkembangan Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020.....	51

<https://gorontalokota.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kota Gorontalo 2016-2020.....	61
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020.....	62
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020.....	63
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020.....	64
Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020.....	65
Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020.....	66

BAB I PENDAHULUAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (SNA) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi,

serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;

- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
 - c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan

⁴ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). CSD merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). ELA merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
 - Valuasi
Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.
 - Klasifikasi
Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

<https://gorontalokota.bps.go.id>

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://gorontalokota.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran¹. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan

¹ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah

11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel

12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi,

bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

$$\text{PK-P atas dasar harga Berlaku} = \text{Output} - \text{Penjualan barang dan jasa} + \\ \text{Social transfer in kind purchased market production} + \\ \text{Output Bank Indonesia}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

<https://gorontalokota.bps.go.id>

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources/CBR*). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi

- lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : $PMTB_{ADHB} = \text{Total Supply Barang} \times \text{Rasio PMTB}$

Pendekatan Ekstrapolasi : $PMTB_{ADHB}(t) = PMTB_{ADHB}(t-1) \times \text{Indeks Produksi}(t)$

<https://gorontalokota.bps.go.id>

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula

pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan
9. Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume inventori (t) - Volume inventori (t-1) × Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan × IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KOTA GORONTALO

**Berdasarkan PDRB Pengeluaran Kota Gorontalo
Tahun 2016-2020**



Perubahan struktur ekonomi Kota Gorontalo akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 s.d. 2020, tidak terlepas dari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Dilihat dari sumbernya, faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sementara itu, faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh struktur perdagangan sebagai akibat peningkatan perdagangan antar kabupaten maupun internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kota Gorontalo digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan Perubahan Inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KOTA GORONTALO MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kota Gorontalo menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2016 s.d. 2019). Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan pada total PDRB. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menunjukkan arah yang negative sebagai dampak dari adanya pandemi Covid19.

Tabel 1.
PDRB Kota Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
2016-2020(miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.182,41	4.630,64	5.055,77	5.532,87	5.573,70
2. Konsumsi LNPRT	38,56	43,21	48,22	54,04	53,78
3. Konsumsi Pemerintah	2.322,31	2.520,28	2.665,73	2.809,19	2.659,27
4. PMTB	2.328,69	2.496,34	2.681,32	2.848,47	2.848,63
5. Perubahan Inventori	128,29	148,60	165,95	171,97	134,52
6. Net Ekspor	(2.533,87)	(2.742,24)	(2.868,76)	(2.963,36)	(2.732,57)
Total PDRB	6.466,38	7.096,84	7.748,24	8.453,19	8.537,34

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Nilai PDRB Kota Gorontalo atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2016 s.d. 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi salah satunya oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2015 nilainya sebesar 6.466,38 miliar rupiah dan meningkat menjadi 8.537,34 miliar rupiah pada tahun 2020.

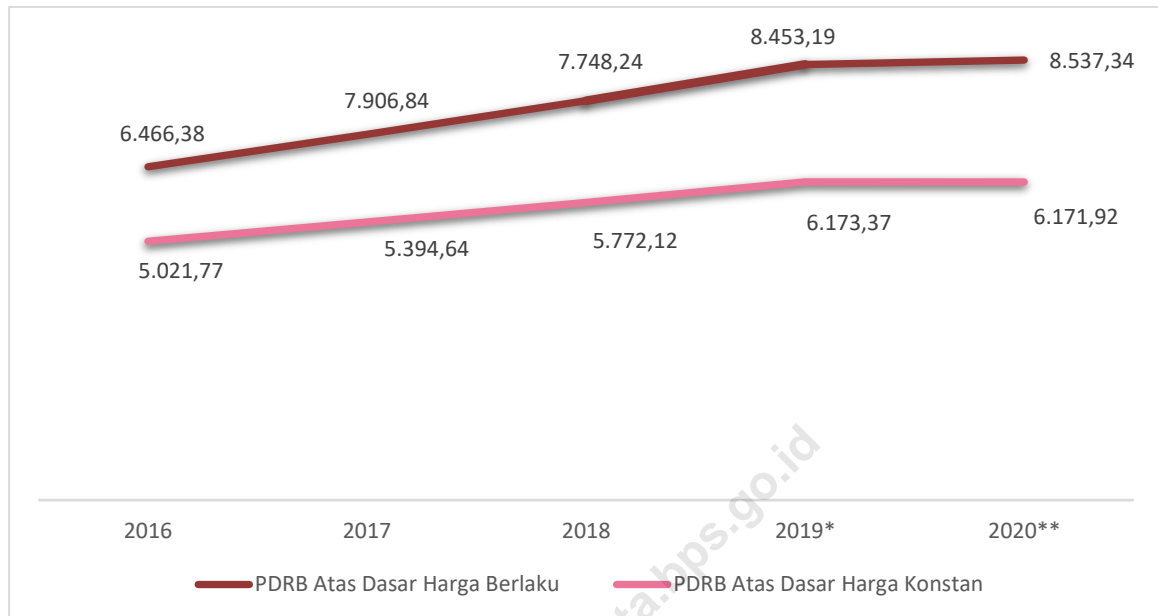
Tabel 2.
PDRB Kota Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
2016-2020 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3.109,95	3.338,33	3.508,22	3.841,69	3.831,74
2. Konsumsi LNPRT	29,53	32,41	35,58	38,86	38,50
3. Konsumsi Pemerintah	1.555,69	1.636,37	1.709,38	1.791,09	1.681,73
4. PMTB	1.847,62	1.922,71	2.014,25	2.101,48	2.080,48
5. Perubahan Inventori	73,55	80,17	86,36	87,61	67,83
6. Net Ekspor	(1.594,57)	(1.615,34)	(1.653,47)	(1.687,37)	(1.528,35)
Total PDRB	5.021,77	5.394,64	5.772,12	6.173,37	6.171,92

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut Pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut Pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016-2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kota Gorontalo berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya, dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Namun pada tahun 2020, semua komponen menunjukkan adanya penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Gambar 1.
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2016-2020 (miliar rupiah)



Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Gambar 1 menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Gambar 1 juga menunjukkan bahwa adanya pelebaran pada jarak kurva PDRB ADHB dan PDRB ADHK, hal ini disebabkan oleh adanya kejadian inflasi (kenaikan harga) di setiap tahun.

Total PDRB terbentuk dari kontribusi semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), dan Ekspor Neto (E) atau Ekspor (X) dikurangi Impor (M).

Tabel 3.
**Distribusi PDRB Kota Gorontalo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
2016-2020 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,68	65,25	65,25	65,45	65,29
2. Konsumsi LNPRT	0,60	0,61	0,62	0,64	0,63
3. Konsumsi Pemerintah	35,91	35,51	34,40	33,23	31,15
4. PMTB	36,01	35,18	34,61	33,70	33,37
5. Perubahan Inventori	1,98	2,09	2,14	2,03	1,58
6. Net Ekspor	(39,19)	(38,64)	(37,02)	(35,06)	(32,01)
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2016-2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan Konsumsi Akhir Rumah Tangga (di atas 50 persen). Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 33-36 persen. Selanjutnya, proporsi Konsumsi Akhir Pemerintah juga berada pada rentang 33-36 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Di sisi lain, pada tahun 2016-2020, perdagangan antarwilayah Kota Gorontalo, baik perdagangan internasional maupun perdagangan antar Kabupaten yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor cenderung lebih rendah dari nilai impor. Kecenderungan perdagangan Kota Gorontalo ini dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Tabel 4.
**Pertumbuhan PDRB Kota Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
2016-2020 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	7,15	7,34	7,25	7,30	-0,26
2. Konsumsi LNPRT	8,40	9,74	9,16	9,85	-0,94
3. Konsumsi Pemerintah	-1,37	5,19	4,46	4,78	-6,11
4. PMTB	5,52	4,06	4,76	4,33	-1,00
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	7,41	7,43	7,00	6,95	-0,02

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo dari tahun 2016 s.d. 2020 secara rata-rata mencapai 5,75 persen. Dilihat dari polanya, pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo dalam periode 2016-2019 mengalami fluktuasi yang menandakan bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sebagian tahun, dan percepatan di tahun lainnya. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid 19 yang melanda dunia mengakibatkan perekonomian terkena dampak yang cukup parah. Hal ini juga mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Gorontalo tahun 2020 mengalami kontraksi 0,02 persen. Angka ini merupakan angka pertumbuhan ekonomi paling rendah dalam 10 tahun terakhir).

Tabel 5.
**Indeks Implisit PDRB Kota Gorontalo Menurut Pengeluaran
2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	134,48	138,71	141,21	144,02	145,46
2. Konsumsi LNPRT	130,58	133,34	136,32	139,06	139,70
3. Konsumsi Pemerintah	149,28	154,02	155,95	156,84	158,13
4. PMTB	128,04	129,83	133,12	135,55	136,92
5. Perubahan Inventori	174,42	185,37	192,16	196,29	198,33
6. Net Ekspor	158,91	185,37	173,50	175,62	178,79
Total PDRB	128,77	169,76	134,24	136,93	138,33

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Selain pertumbuhan ekonomi, indeks implisit PDRB dan lajunya juga merupakan salah satu agregat nasional lain yang kerap dianalisis. Indeks implisit menunjukkan perbandingan

antara PDRB ADHB dengan PDRB ADHK. Di 2016-2020, indeks implisit PDRB Kota Gorontalo berada di angka lebih dari 100 untuk seluruh konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Hal ini menunjukkan bahwa harga-harga di lima tahun terakhir lebih besar dibandingkan harga di tahun dasar (2010=100), untuk setiap komponen pengeluaran. Selain itu, indeks implisit¹ PDRB secara agregat menunjukkan peningkatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan ini dijelaskan dengan adanya fenomena inflasi di setiap tahun.

Tabel 6.
Laju Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo
2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,70	3,14	1,80	1,99	1,00
2. Konsumsi LNPRT	3,22	2,11	2,23	2,01	0,47
3. Konsumsi Pemerintah	4,85	3,17	1,25	0,57	0,82
4. PMTB	3,47	3,01	2,53	1,82	1,02
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
Total PDRB	3,97	2,16	3,04	2,01	1,04

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Sementara itu, laju indeks implisit² PDRB yang menggambarkan tingkat laju perubahan harga secara implisit yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) secara agregat menunjukkan angka yang positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan tingkatan harga di setiap tahun. Dilihat dari polanya, terjadi percepatan dan perlambatan laju indeks implisit pada Total PDRB, yang menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, terjadi percepatan peningkatan harga pada beberapa tahun dan perlambatan peningkatan harga pada tahun lainnya.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi Akhir Rumah Tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut Pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi Konsumsi Akhir Rumah Tangga.

¹ Indeks perkembangan

² Indeks perkembangan

Tabel 7.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (<i>Miliar Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	4.182,41	4.630,64	5.055,77	5.532,87	5.573,70
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	3.109,95	3.338,33	3.580,22	3.841,69	3.831,74
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	64,68	65,25	65,25	65,45	65,29
Rata-rata Konsumsi per Kapita/Tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	20.258,30	21.968,88	23.505,82	25.218,32	24.915,65
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	15.063,64	15.837,84	16.645,55	17.510,07	17.128,67
Pertumbuhan (%)					
a. Total Konsumsi Rumah Tangga	7,15	7,34	7,25	7,30	-0,26
b. Per Kapita	4,94	5,14	5,10	5,19	-2,18
Jumlah Penduduk (000 Orang)	206,45	210,78	215,09	219,40	223,70

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2020, Konsumsi Akhir Rumah Tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai Konsumsi Rumah Tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2016 s.d. 2020 secara rata-rata berada pada kisaran 65,18 persen yang mengindikasikan bahwa lebih dari setengah nilai konsumsi akhir berasal dari aktor ekonomi Rumah Tangga. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu 65,44 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016, yaitu 64,68 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita terus meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk

Konsumsi Rumah Tangga. Namun, pada tahun 2020 konsumsi perkapita mengalami penurunan disbanding tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid19 yang mengakibatkan pendapatan rumah tangga menurun yang pada akhirnya menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2016, secara umum setiap penduduk di Kota Gorontalo menghabiskan dana sekitar 20,25 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi setiap tahunnya hingga di 2019 menjadi 25,21 juta rupiah. Namun pada tahun 2020 konsumsi perkapita turun menjadi 24,91 juta rupiah.

Sementara itu, pada perkiraan atas dasar harga konstan 2010, total konsumsi rumah tangga tumbuh pada kisaran 7,15-7,30 persen pada tahun 2016-2019, dengan pola yang fluktuatif, artinya terjadi percepatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di beberapa tahun dan perlambatan di tahun lainnya. Pertumbuhan yang selalu positif di setiap tahunnya dalam periode 2016-2019 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Adapun faktor yang menyebabkannya salah satunya adalah pertumbuhan penduduk, namun pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar minus 0,26 persen, dimana penyebabnya adalah pandemi Covid19 yang melanda dunia

Konsumsi per kapita juga selalu mengalami pertumbuhan selama kurun waktu 4 tahun terakhir, ditunjukkan dengan angka pertumbuhan konsumsi per kapita yang selalu positif dalam rentang waktu 2016-2019. Pada tahun 2019, pertumbuhan konsumsi per kapita tercatat sebesar 5,19 perse namun harus rela terkontraksi sebesar minus 2,18 persen pada tahun 2020.

Tabel 8.
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo
2016-2020³ (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	44,07	43,86	43,44	42,59	43,79
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,31	5,26	5,31	5,36	5,37
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,86	9,97	10,06	10,13	10,40
d. Kesehatan dan Pendidikan	7,56	7,73	8,07	8,41	8,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	22,70	22,82	22,89	23,03	21,83
f. Hotel dan Restoran	4,33	4,21	4,16	4,12	4,02
g. Lainnya	6,17	6,15	6,08	5,99	6,04
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku

Secara rata-rata dari tahun 2016 s.d. 2020, struktur Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo menunjukkan bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan berkisar antara 42,95-44,07 persen dan bukan makanan berkisar antara 55,93-57,05 persen. Meski begitu, jika diurai dalam 7 kelompok komoditas, sebagian besar pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga teralokasi pada komoditas makanan.

Perbedaan proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik-menarik antara kebutuhan rumah tangga atas komoditas-komoditas konsumsi masih cukup kuat. Sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut diantaranya meliputi: biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

Tabel 9.
Pertumbuhan Riil Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo
2016-2020 (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,14	5,98	6,04	6,00	1,70
b. Pakaian dan Alas Kaki	6,95	7,22	8,32	8,34	-0,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,54	8,39	8,94	9,09	1,43
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,51	9,00	10,32	10,10	1,27
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,97	8,87	7,80	8,00	-4,53
f. Hotel dan Restoran	5,39	5,79	5,80	5,76	-2,91
g. Lainnya	8,21	7,89	6,52	6,63	1,00
Konsumsi Rumah Tangga	7,15	7,34	7,25	7,30	-0,26

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pada kurun waktu 4 tahun terakhir (2016 s.d. 2019), seluruh komoditas mengalami pertumbuhan dalam pengeluaran untuk konsumsinya. Namun pada tahun 2020 karena adanya Covid19, beberapa komoditas pertumbuhannya berkontraksi seperti Pakaian dan Alas Kaki karena berkurangnya daya beli masyarakat. Selain itu Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya mengalami kontraksi karena adanya pembatasan bepergian dan pembatasan berkumpul selama masa pandemi, serta Hotel dan Restoran yang juga pertumbuhannya mengalami kontraksi sebagai dampak dari covid19. Adanya kontraksi pada tiga komoditas ini menyebabkan pertumbuhan komponen Konsumsi Rumah Tangga secara total juga

mengalami kontraksi sebesar -0,26 pada tahun 2020. Pertumbuhan riil menunjukkan adanya peningkatan kuantitas atau volume pada komoditas yang dikonsumsi, tanpa melibatkan faktor harga. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan rakyat atau peningkatan kemakmuran rakyat (dibutuhkan variabel lain untuk memastikannya).

Tabel 10.
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kota Gorontalo 2016-2020⁴ (persen)

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,94	3,96	1,98	2,08	1,02
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,67	2,26	1,79	1,99	1,01
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,77	3,30	1,13	1,04	1,97
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,84	3,89	3,23	3,70	1,04
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-0,07	2,22	1,60	1,95	0,01
f. Hotel dan Restoran	1,41	1,78	1,88	2,60	1,05
g. Lainnya	0,87	2,35	1,26	1,15	0,53

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 10, rata-rata menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi, ditunjukkan oleh nilai laju implisit yang hampir selalu positif. Dilihat pada masing-masing komoditas, peningkatan harga (inflasi) yang terjadi selama periode 2016 s.d. 2020 relatif berbeda-beda. Pada beberapa tahun, peningkatan harga terlihat mengalami penguatan, sementara pada tahun lainnya mengalami perlambatan.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut Pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Tabel 11.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Kota Gorontalo
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT (<i>Miliar Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	38,56	43,21	48,22	54,04	53,78
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	29,53	32,41	35,38	38,86	38,50
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	0,60	0,61	0,62	0,64	0,63

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Berdasarkan data pada Tabel 11, nampak bahwa secara nominal nilai pengeluaran konsumsi LNPRT pada tahun 2016 tercatat sebesar 38,56 miliar rupiah dan meningkat menjadi 53,78 miliar rupiah pada tahun 2020. Sejalan dengan itu, secara riil pengeluaran konsumsi institusi ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019), ini menandakan bahwa secara kuantitas atau volume, konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2020 LNPRT juga tidak luput dari dampak Covid19, hal ini terlihat dari nilai pengeluaran pada tahun 2020 yang mengalami penurunan dibanding tahun 2019. Adapun Tabel 11 juga menyajikan besaran pangsa konsumsi LNPRT terhadap PDRB, dimana komponen ini hanya memberikan kontribusi di bawah 1 persen terhadap total PDRB yang tercipta di Kota Gorontalo. LNPRT di Kota Gorontalo umumnya didominasi oleh lembaga keagamaan, seperti: masjid, organisasi keagamaan, dan sebagainya.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi Akhir Pemerintah bersama dengan Pengeluaran Akhir Rumah Tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam perekonomian suatu wilayah. Peranan Konsumsi Pemerintah dalam perekonomian Kota Gorontalo serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian berikut ini.

Tabel 12.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kota Gorontalo
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (<i>Miliar Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	2.322,31	2.520,28	2.665,73	2.809,19	2.659,27
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	1.555,69	1.636,37	1.709,38	1.791,09	1.681,73
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	35,91	35,51	34,40	33,23	31,15
Konsumsi Pemerintah per Kapita/Tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	11.248,57	11.956,94	12.393,77	12.804,00	11.887,52
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	7.535,30	7.763,43	7.947,41	8.163,63	7.517,69
Pertumbuhan[1] (%)					
a. Total Konsumsi Pemerintah	-1,37	5,19	4,46	4,78	-6,11
b. Konsumsi per Kapita	-3,40	3,03	2,37	2,72	-7,91
Jumlah Penduduk (000 Orang)	206,45	210,78	215,09	219,40	223,70

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Pada tahun 2016, total Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 2.322,31 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 2.809,19 miliar rupiah. Sementara itu, Konsumsi Pemerintah atas dasar harga konstan 2010, cenderung mengalami peningkatan pada masing-masing tahun kecuali pada tahun 2020 angkanya berkontraksi sebesar 6,11 persen dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang terjadi pada tahun 2020.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dari 35,91 persen di tahun 2016 menjadi 31,15 persen pada tahun 2020. Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata Konsumsi Pemerintah per kapita. Pada tahun 2016, Konsumsi Pemerintah per kapita atas dasar harga berlaku sebesar 11.248,57 ribu rupiah, dan terus meningkat hingga tahun 2019, namun pada tahun 2020 Konsumsi Pemerintah perkapita mengalami penurunan (Tabel 12). Konsumsi pemerintah per

kapita menunjukkan rata-rata pengeluaran yang dihabiskan pemerintah per masing-masing penduduk.

Dari sisi lajunya, pertumbuhan konsumsi pemerintah per kapita mengalami fluktuasi dengan perlambatan dan percepatan laju terjadi secara bergantian dalam lima tahun terakhir, dimana pada tahun 2020 laju pertumbuhan komponen ini terkontraksi sebesar 7,91 persen sebagai dampak dari adanya pandemi Covid19.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut Pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi fisik atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁵. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur PMTB Kota Gorontalo
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	2.328,69	2.496,34	2.681,32	2.848,47	2.848,63
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	1.847,62	1.922,71	2.014,25	2.101,48	2.080,48
Proporsi terhadap PDRB (% Atas Dasar Harga Berlaku)	36,01	35,18	34,61	33,70	33,37
Struktur PMTB ⁶					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	1.430,63	1.501,15	1.592,40	1.659,72	1.656,75
(%)	61,43	60,13	59,39	58,27	58,16
b. Non-bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	898,06	995,18	1.088,92	1.659,72	1.656,75
(%)	38,57	39,87	40,61	41,37	41,84
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>)	2.328,69	2.496,34	2.681,32	2.848,47	2.848,63
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁷ (%)					
a. Bangunan	4,22	1,89	2,87	2,02	-1,13
b. Non-bangunan	7,52	7,29	7,42	7,44	-0,84
Total PMTB	5,52	4,06	4,76	4,33	-1,00

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

⁵ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010

Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016-2019 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adapun pertumbuhannya mengalami fluktuasi, dimana kondisi tahun 2019 memperlihatkan keadaan melambat dari 4,76 persen menjadi 4,34 persen. Namun pada tahun 2020 komponen ini mengalami kontraksi sebesar 1 persen. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam PMTB. Kisaran proporsi sub komponen bangunan adalah 58,27-61,43 persen.

Sementara dilihat dari pertumbuhannya, sub komponen non bangunan memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan sub komponen bangunan. Pertumbuhan sub komponen ini tidak lepas memengaruhi perubahan yang terjadi pada proporsi sub komponen dalam PMTB.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan Perubahan Inventori adalah perubahan dalam bentuk “persediaan” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi, ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini dapat berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya dapat memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila Perubahan Inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen Perubahan Inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kota Gorontalo 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Perubahan Inventori (<i>Miliar Rp</i>)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	128,29	148,60	165,95	171,97	134,52
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	73,55	80,17	86,36	87,61	67,83
Proporsi terhadap PDRB					
(% Atas Dasar Harga Berlaku)	1,98	2,09	2,14	2,03	1,58

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis lebih rinci, Perubahan Inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen Perubahan Inventori tidak banyak dikaji lebih mendalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Selama periode 2016 s.d. 2019, nilai Perubahan Inventori baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2016, nilai Perubahan Inventori atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 128,29 miliar rupiah, kemudian naik hingga 171,97 miliar rupiah di tahun 2019, dan turun menjadi 134,52 miliar rupiah pada tahun 2020 sebagai dampak dari adanya Covid19. Kondisi serupa juga terjadi pada nilai Perubahan Inventori atas dasar harga konstan 2010. Sementara itu, dilihat dari proporsinya, kontribusi komponen ini terhadap total PDRB yang tercipta selama kurun waktu 5 tahun terakhir ini berkisar antara 1,58-2,14 persen.

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antar kabupaten menjadikan komponen ini (dalam *series* PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut Pengeluaran dengan total PDRB menurut Lapangan Usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok, yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan Perubahan Inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki dua (angka), positif atau negatif.

**Tabel 15. Net Ekspor
Kota Gorontalo, Tahun 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Net Ekspor (X-M)					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	-2.533,87	-2.742,24	-2.868,76	-2.963,36	-2.732,57
Atas Dasar Harga Konstan (<i>Miliar Rp</i>)	-1.594,57	-1.615,34	-1.653,47	-1.687,37	-1.528,35

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

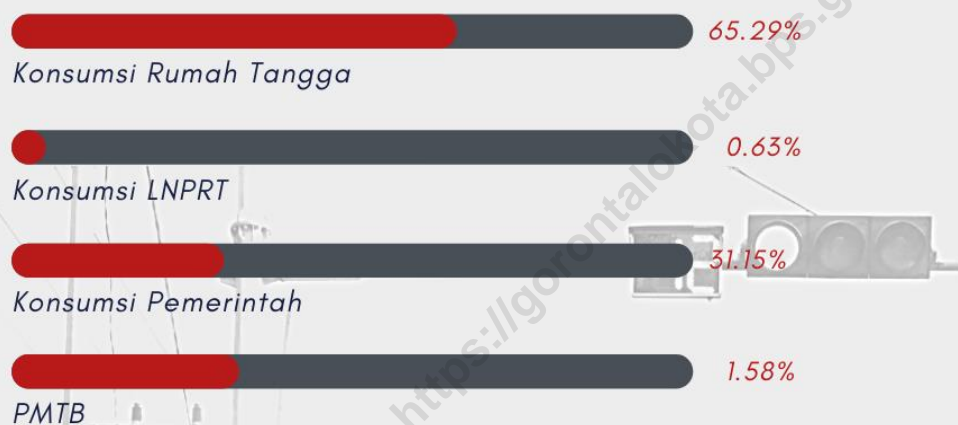
Jika komponen ini bertanda “positif” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Komponen net ekspor Kota Gorontalo dari tahun 2016 s.d. 2020 baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan nilainya negatif yang artinya nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impornya. Hal ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan Kota Gorontalo selalu ‘defisit’.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross-hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor-impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KOTA GORONTALO

Tahun 2014-2018

Distribusi PDRB Pengeluaran ADHB Kota Gorontalo



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Data *series* PDRB Pengeluaran dapat diturunkan menjadi beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita.

Tabel 16.
PDRB dan PDRB per Kapita Kota Gorontalo
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	6.466,38	7.096,84	7.748,24	8.453,19	8.573,34
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	5.021,77	5.394,64	5.772,12	6.173,37	6.171,92
PDRB per Kapita (Ribu Rp)					
a. Atas Dasar Harga Berlaku	31.321,16	33.669,41	36.023,91	38.528,83	38.163,72
b. Atas Dasar Harga Konstan 2010	24.323,93	25.593,71	26.836,33	28.137,62	27.589,77
Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (%)	5,19	5,22	4,86	4,85	-1,95
Jumlah Penduduk (000 Orang)	206,45	210,78	215,09	219,40	223,70
Pertumbuhan (%)	2,10	2,10	2,04	2,01	1,96

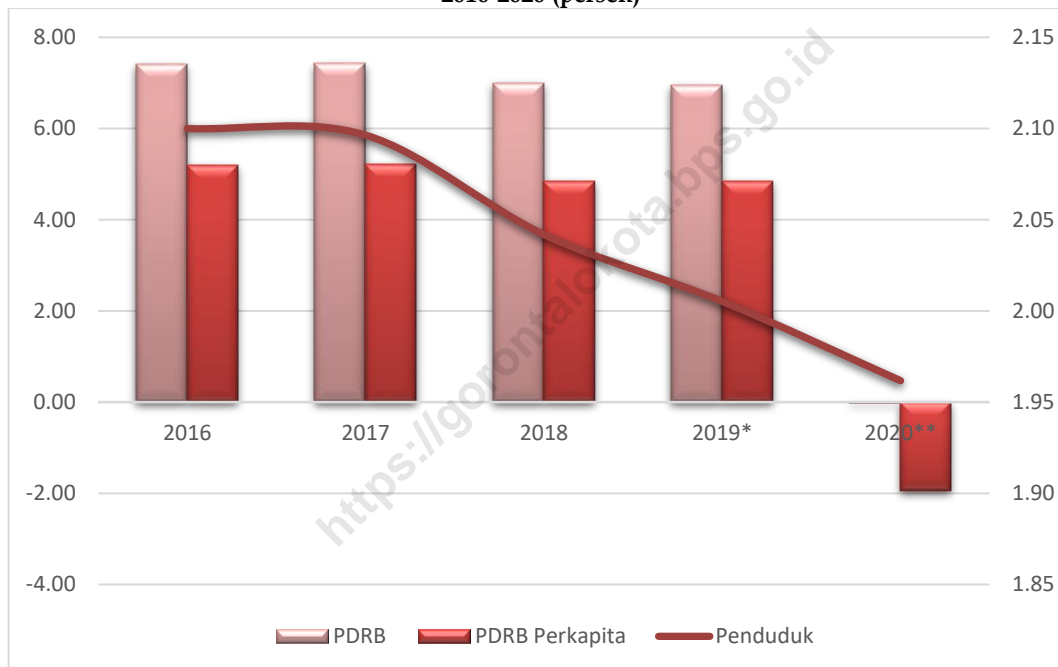
Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

PDRB per kapita Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2019 (Tabel 16), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kota Gorontalo rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Namun pada tahun 2020 peningkatan jumlah penduduk tidak disertai dengan peningkatan PDRB perkapita. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi Covid19 yang membuat perekonomian menjadi lemah sehingga kemampuan penduduk untuk menciptakan nilai tambah menurun.

Sementara itu, pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 4,85-5,22 persen dalam selang waktu 2016-2019, namun harus berkontraksi sebesar 1,95 persen pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 2 persen setiap tahunnya selama periode 2016 s.d. 2020.

Gambar 2.
Pertumbuhan PDRB, PDRB per Kapita, dan Penduduk Kota Gorontalo
2016-2020 (persen)



Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

4.2 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kota Gorontalo digunakan untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga.

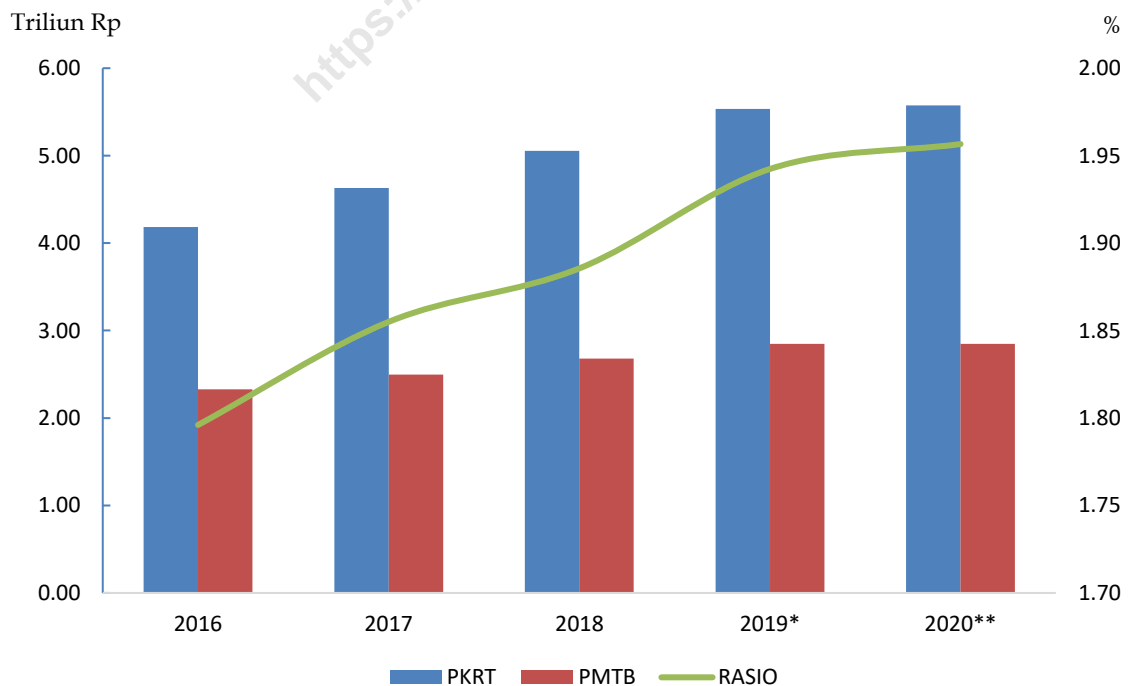
Tabel 17.
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kota Gorontalo, 2016-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	4.182,41	4.630,64	5.055,77	5.532,87	5.573,70
Total PMTB					
Atas Dasar Harga Berlaku (<i>Miliar Rp</i>)	2.328,69	2.496,34	2.681,32	2.848,47	2.848,63
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	1,80	1,85	1,89	1,94	1,96

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB mengalami peningkatan, dari sebesar 1,80 pada tahun 2016 menjadi 1,96 pada tahun 2020, hal ini terjadi karena pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan investasi fisik.

Gambar 3.
Perkembangan Rasio Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Kota Gorontalo, 2016-2020



Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

4.3 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor) untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi: rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

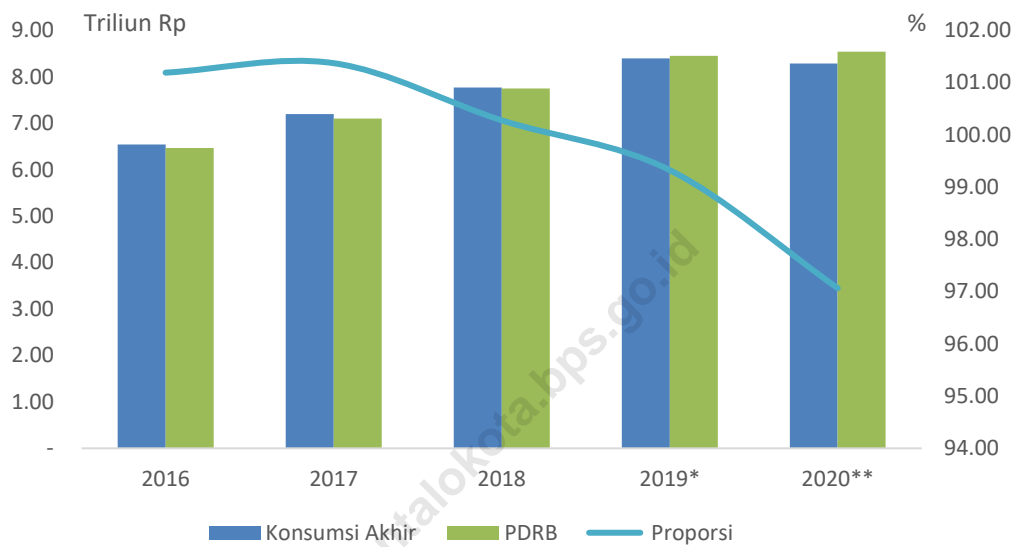
Tabel 18.
Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Gorontalo
2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)					
a. Rumah Tangga	4.182,41	4.630,64	5.055,77	5.532,87	5.573,70
b. LNPRT	38,56	43,21	48,22	54,04	53,78
c. Pemerintah	2.322,31	2.520,28	2.665,73	2.809,19	2.659,27
Jumlah	6.543,28	7.194,13	7.769,72	8.396,10	8.286,76
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rp)	6.466,38	7.096,84	7.748,24	8.453,19	8.537,34
Proporsi (%)	101,19	101,37	100,28	99,32	97,06

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (lebih dari 100 persen). Nilai proporsi yang lebih besar dari 100 persen menunjukkan nilai konsumsi akhir lebih besar dibandingkan nilai barang dan jasa yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Penyebab tingginya nilai konsumsi akhir salah satunya adalah karena Kota Gorontalo merupakan pusat pemerintahan. Sementara itu, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB dan Net Ekspor) memiliki peran yang relatif kecil. Adapun di tahun 2019 dan tahun 2020, proporsi berada di bawah 100, yang menunjukkan bahwa nilai konsumsi akhir lebih kecil dibandingkan nilai barang dan jasa yang berada di wilayah Kota Gorontalo. Penurunan proporsi ini dapat dijelaskan salah satunya oleh peningkatan peranan produk yang tidak digunakan dalam konsumsi akhir, yaitu PMTB dan Net Ekspor. Meski begitu, proporsi ini terlihat hampir mendekati seratus sehingga nilai konsumsi akhir hanya sedikit lebih kecil dibandingkan nilai barang dan jasa yang berada di wilayah Kota Gorontalo.

Gambar 4.
Perkembangan Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kota Gorontalo
2016-2020



Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

BAB V PENUTUP



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kota Gorontalo pada periode tersebut. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR), pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri maupun perdagangan antar daerah. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2016 s.d. 2020, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam bentuk satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, orang, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain, seperti: pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan, secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain, seperti: PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti: ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kota Gorontalo terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*) maupun daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input-Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Statistik Listrik, Gas, dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
6. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD 1997*, Jakarta 2000.
11. _____, *Profil Ekonomi Rumah Tangga 1998*, Jakarta 1999.
12. Frenken Jim, *How to Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands 1992.
13. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC 1979.
14. Keuning, J. Steven, *An Estimate of The Fixed Capital Stock by Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No. 4, Jakarta 1988.
15. United Nations, *A System of National Accounts*, Studies in Methods, Series F No. 2 Rev. 3, New York 1968.
16. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev. 1, New York 1973.
17. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York 1986.
18. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts*, Studies Methods, Series F No. 50, New York 1988.
19. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting*, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76, New York 2000.

20. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta 1997.
21. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC 1993.

<https://gorontalokota.bps.go.id>

LAMPIRAN

<https://gorontalokota.bps.go.id>



**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020**

Komponen	2016	2017	2018	2019*	(Juta Rupiah) 2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,182,406.95	4.630.643,80	5.055.772,94	5.532.874,64	5.573.704,77
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,843,206.65	2.030.798,30	2.196.101,69	2.376.124,30	2.440.979,14
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	222,018.25	243.428,36	268.416,75	296.616,66	299.330,88
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	412,291.70	461.636,11	508.568,96	560.566,56	579.818,41
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	316,190.08	358.054,29	407.750,19	465.527,00	476.366,90
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	949,502.43	1.056.736,12	1.157.346,89	1.274.411,11	1.216.805,83
1.f. Hotel dan Restoran	181,199.74	195.108,35	210.312,39	228.223,98	223.896,06
1.g. Lainnya	257,998.10	284.882,26	307.276,06	331.405,03	336.511,56
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	38,561.96	43.213,79	48.224,14	54.040,08	53.783,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,322,312.00	2.520.284,64	2.665.725,65	2.809.185,16	2.659.273,68
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,328,685.05	2.496.335,49	2.681.324,84	2.848.474,69	2.848.630,98
4.a. Bangunan	1,430,626.90	1.501.154,10	1.592.400,43	1.659.717,15	1.656.752,67
4.b. Non-Bangunan	898,058.14	995.181,39	1.088.924,41	1.188.757,53	1.191.878,31
5. Perubahan Inventori	128,287.12	148.604,56	165.949,56	171.970,00	134.520,32
6. Net Ekspor	-2,533,874.63	-2.742.244,06	-2.868.757,95	-2.963.358,74	-2.732.573,50
P D R B	6,466,378.45	7.096.838,22	7.748.239,18	8.453.185,84	8.537.339,39

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

**Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020**

Komponen	(Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,109,948.60	3.338.331,23	3.580.223,81	3.841.691,90	3.831.735,20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	1,282,413.51	1.359.122,25	1.441.206,83	1.527.644,26	1.553.568,90
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	170,651.71	182.964,65	198.191,26	214.730,03	214.518,80
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	313,201.31	339.467,70	369.809,12	403.440,00	409.221,14
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	238,515.20	259.977,03	286.801,38	315.756,75	319.775,65
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	752,244.41	819.004,29	882.853,44	953.515,26	910.316,32
1.f. Hotel dan Restoran	141,246.45	149.426,41	158.098,32	167.210,23	162.342,76
1.g. Lainnya	211,676.00	228.368,89	243.263,48	259.395,37	261.991,64
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	29,530.34	32.407,76	35.376,37	38.862.18	38.497,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,555,692.03	1.636.374,72	1.709.376,65	1.791.091,20	1.681.730.07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,847,617.30	1.922.705,85	2.014.250,99	2.101.479,30	2.080.476,10
4.a. Bangunan	1,102,891.71	1.123.711,98	1.156.007,13	1.179.390,50	1.166.089,57
4.b. Non-Bangunan	744,725.58	798.993,86	858.243,86	922.088,80	914.386,54
5. Perubahan Inventori	73,551.59	80.165,18	86.359,47	87.610,90	67.827,78
6. Net Ekspor	-1,594,566.55	-1.615.342,06	-1.653.468,26	-1.687.369,84	-1.528.351,63
P D R B	5,021,773.31	5.394.642,68	5.772.119,03	6.173.365,63	6.171.915,32

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	64,68	65,25	65,25	65,45	65,29
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	28,50	28,62	28,34	28,11	28,59
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,43	3,43	3,46	3,51	3,51
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,38	6,50	6,56	6,63	6,79
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,89	5,05	5,26	5,51	5,58
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	14,68	14,89	14,94	15,08	14,25
1.f. Hotel dan Restoran	2,80	2,75	2,71	2,70	2,62
1.g. Lainnya	3,99	4,01	3,97	3,92	3,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,60	0,61	0,62	0,64	0,63
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	35,91	35,51	34,40	33,23	31,15
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	36,01	35,18	34,61	33,70	33,37
4.a. Bangunan	22,12	21,15	20,55	19,63	19,41
4.b. Non-Bangunan	13,89	14,02	14,05	14,06	13,96
5. Perubahan Inventori	1,98	2,09	2,14	2,03	1,58
6. Net Ekspor	-39,19	-38,64	-37,02	-35,06	-32,01
P D R B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020**

Komponen	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	7,15	7,34	7,25	7,30	-0,26
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,14	5,98	6,04	6,00	1,70
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	6,95	7,22	8,32	8,34	-0,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,54	8,39	8,94	9,09	1,43
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,51	9,00	10,32	10,10	1,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,97	8,87	7,80	8,00	-4,53
1.f. Hotel dan Restoran	5,39	5,79	5,80	5,76	-2,91
1.g. Lainnya	8,21	7,89	6,52	6,63	1,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,40	9,74	9,16	9,85	-0,94
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-1,37	5,19	4,46	4,78	-6,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5,52	4,06	4,76	4,33	-1,00
4.a. Bangunan	4,22	1,89	2,87	2,02	-1,13
4.b. Non-Bangunan	7,52	7,29	7,42	7,44	-0,84
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B	7,41	7,43	7,00	6,95	-0,02

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

**Lampiran 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020**

Komponen	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	134,48	138,71	141,21	144,02	145,46
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	143,73	149,42	152,38	155,54	157,12
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	130,10	133,05	135,43	138,13	139,54
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	131,64	135,99	137,52	138,95	141,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	132,57	137,73	142,17	147,43	148,97
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	126,22	129,03	131,09	133,65	133,67
1.f. Hotel dan Restoran	128,29	130,57	133,03	136,49	137,92
1.g. Lainnya	121,88	124,75	126,31	127,76	128,44
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	130,58	133,34	136,32	139,06	139,70
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	149,28	154,02	155,95	156,84	158,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	126,04	129,83	133,12	133,55	136,92
4.a. Bangunan	129,72	133,59	137,15	140,73	142,08
4.b. Non-Bangunan	120,59	124,55	126,88	128,92	130,35
5. Perubahan Inventori	174,42	185,37	192,16	196,29	198,33
6. Net Ekspor	158,91	169,76	134,24	175,62	178,79
P D R B	128,77	131,55	134,24	136,93	138,33

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

**Lampiran 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100)
Menurut Pengeluaran Kota Gorontalo, 2016-2020**

Komponen	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,70	3,14	1,80	1,99	1,00
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,94	3,96	1,98	2,08	1,02
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,67	2,26	1,79	1,99	1,01
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan, dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,77	3,30	1,13	1,04	1,97
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,84	3,89	3,23	3,70	1,04
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-0,07	2,22	1,60	1,95	0,01
1.f. Hotel dan Restoran	1,41	1,78	1,88	2,60	1,05
1.g. Lainnya	0,87	2,35	1,26	1,15	0,53
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,22	2,11	2,23	2,01	0,47
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,85	3,17	1,25	0,57	0,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3,47	3,01	2,53	1,82	1,02
4.a. Bangunan	2,77	2,99	3,11	2,16	0,96
4.b. Non-Bangunan	4,79	3,29	1,87	1,61	1,11
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
P D R B	3,97	2,16	2,04	2,01	1,02

Keterangan: * angka sementara ** angka sangat sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA GORONTALO**

Jl Dewi Sartika No.21, Kota Tengah, Kota Gorontalo
Telp.(0435)-821956, Fax: (0435)-826644
E-mail: bps7571@bps.go.id
Website: <http://gorontalokota.bps.go.id>

